



SEMINAR NASIONAL

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

TEMA
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN

PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) yang merupakan posisi strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan harus siap dan menjadi pelopor pembangunan ekonomi yang berkiblat pada sektor Kelautan dan Perikanan. Saatnya sektor kelautan dan perikanan menjadi base development dalam membangun negara. Antara pulau satu dengan pulau lainnya yang dipisahkan oleh laut, tapi bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan. Sejak zaman dahulu, pelayaran dan perdagangan memang sangat terkenal di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam perahu tradisional yang digunakan, itulah sebabnya nenek moyang masyarakat Indonesia merupakan pelaut yang handal sebab mereka dengan mudah berhubungan dan berinteraksi dengan pihak luar.

Namun demikian, kondisi faktual menunjukkan bahwa keberadaan daerah kepulauan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh daerah kepulauan di Indonesia. Mulai dari kurangnya infrastruktur primer untuk masyarakat,



aktifitas ekonomi yang terbatas, masih rawannya keamanan khususnya di daerah kepulauan yang memiliki akses sebagai pulau-pulau terluar atau berdekatan dengan perbatasan dengan negara lain. Dan yang terpenting adalah minimnya anggaran yang disalurkan untuk daerah kepulauan.

Selain itu, dengan besarnya potensi subur daya di daerah kepulauan khususnya potensi yang ada dilaut, masalah lainnya yang muncul adalah isu kewenangan pengelolaan wilayah laut yang menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Ada pihak yang beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya desentralisasi, kewenangan mutlak berada di tangan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan daerah sekitar dan terlebih-lebih kepentingan pemerintah pusat.

Pada prinsipnya, permasalahan daerah kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) permasalahan utama, yaitu:

1. Sebagian besar pulau-pulau merupakan daerah kawasan tertinggal dan banyak yang tidak berpenghuni;
2. Keterbatasan pelayanan administrasi pemerintah, pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya, sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, termasuk transportasi laut yang menghubungkan antarapulau kecil dan pulau besarnya;
3. Terjadinya ilegal dan penyeludupan, kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan; dan
4. Kurangnya data (lebih dari 9.600 pulau belum bernama) dan keberadaan pulau-pulau kecil.

Untuk menjawab permasalahan dan mempercepat akselerasi pembangunan di daerah kepulauan yang ada di Indonesia, maka pada tahun 2008 dibentuk Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, yang anggotanya 7 (tujuh) provinsi kepulauan di Indonesia, termasuk salah satunya Kepulauan Riau. Produk dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan tersebut adalah menyusun sebuah Rancangan Undang-undang, tentang Daerah Kepulauan yang dalam perkembangan penyusunan rancangan undang-undang tersebut, judul RUU



Daerah Kepulauan berubah menjadi Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan, dengan maksud agar dalam pengaturan perundang-undangan ini terdapat *affirmative action* terhadap pembangunan di daerah kepulauan.

Merespon hal tersebut diatas, maka kami bermaksud untuk mengadakan seminar nasional yang membicarakan mengenai pembangunan di daerah kepulauan guna memberikan masukan pemikiran agar akselerasi pembangunan di daerah kepulauan menjadi lebih cepat dan efektif.

TUJUAN

Kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan” bertujuan untuk :

1. Menghimpun pemikiran dalam rangka memecahkan dan merumuskan solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah kepulauan.
2. Membangun persamaan pandangan dan persepsi terkait pentingnya prioritas dan percepatan akselerasi pembangunan di daerah kepulauan baik dari sudut pandang Pemerintah DPR, dan Masyarakat di daerah kepulauan
3. Membangun pemahaman dan menggalang dukungan dari masyarakat di daerah kepulauan akan pentingnya regulasi khusus yang mengatur tentang daerah kepulauan dalam bentuk undang-undang.
4. Memberikan dorongan agar RUU percepatan pembangunan daerah kepulauan ini kembali masuk dalam program legislasi nasional tahun 2004-2019 dan segera di sahkan menjadi undang-undang.

PEMBICARA SEMINAR NASIONAL

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Tjahjo Kumolo | (Menteri Dalam Negeri) |
| 2. Dr. Ir. Ridwan Djameluddin, M.Sc
Infrastruktur) | (Deputi III Bid. Koordinasi |
| 3. Dr. H. Nurdin Basirun | (Gubernur Kepulauan Riau) |
| 4. Andrianof Chaniago | (Kepala BAPPENAS 2014-2015) |



PEMAKALAH

Pemakalah dalam seminar ini ditargetkan terdiri dari akademisi atau peneliti yang berada di daerah kepulauan (khususnya Kepulauan Riau) dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia umumnya.

SUB TEMA

1. Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kepulauan
2. Menejemen dan Kebijakan Daerah Kepulauan
3. Dinamika Kehidupan Sosial dan Budaya Maritim
4. Urgensi Regulasi Berbasis Kemaritiman dan Perbatasan
5. ASEAN dan Pembangunan Ekonomi Maritim
6. Sub Tema lain yang Relevan

KETENTUAN PENULISAN ABSTRAK

1. Abstrak memuat Judul, Nama Para Penulis, Institusi, dan Alamat lengkap;
2. Ditulis menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
3. Jumlah kata 150-200;
4. Diketik menggunakan huruf Times New Roman 12pt;
5. Kertas A4;
6. Spasi tunggal;
7. Penelitian yang telah selesai seluruhnya memuat atau sebagian dari cakupan larat bekalang, tujuan, metode, hasil serta kesimpulan;
8. Rencana penelitian mencakup setidaknya mengenai latar belakang, topik, tujuan yang ingin dicapai, metodologi yang diusulkan serta gambaran hasil penelitian.

KETENTUAN PENULISAN PAPER

Penulisan Paper harus sesuai dengan ketentuan dari Panitia SPDK, adapun muatan ketentuan tersebut adalah :



1. Ditulis dengan ketentuan 1,5 spasi pada kertas A4, dengan panjang tulisan 5.000 kata, menggunakan huruf Times New Roman 12pt.
2. Kertas ukuran A4, margin atas dan kiri 4cm, margin bawah dan kanan 3cm
3. Sistematika Penulisan memuat:
 - a) Judul, Nama penulis, abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Inggris;
 - b) Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan, Metode Penelitian;
 - c) Tinjauan Pustaka;
 - d) Pembahasan (topik dan sub-sub topik pembahasan);
 - e) Penutup (kesimpulan dan saran);
 - f) Daftar kepustakaan (berisi sumber yang dirujuk dalam uraian saja) dari sumber-sumber yang mutahir dengan Referensi menggunakan *APA Style*.
4. Setiap kutipan harus menyertakan sumbernya yang ditulis pada akhir kutipan (*Body Note*) *APA Style* Contoh : (Suryo,1999)
5. Paper dikirim ke panitia SPDK dalam format Microsoft Word bentuk softcopy melalui email semnas.fisip@umrah.ac.id

WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan seminar umum dengan tema “Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan” akan dilaksanakan di Auditorium UMRAH Dompok, pada:

Hari/tanggal : Rabu, 15 November 2017

Waktu : 08.30 s.d selesai

Tempat : Auditorium UMRAH Dompok

TANGGAL PENTING

Pendaftaran

Pengumpulan Abstrak 20 Oktober 2017



Pengumuman diterima 25 Oktober 2017

Full Paper 1 November 2017

CONTAC PERSON

Email : semnas.fisip@umrah.ac.id

Ady Muzwardi (0813-2840-7846)

Ayu Efritadewi (0815-3673-0224)

Ketentuan Penulisan : <http://fisip.umrah.ac.id/>

BIAYA PENDAFTARAN

Pemakalah 250 K

Field Trip 200 K

Rekening BTN

4801500312167 an. Ayu Efritadewi

PENUTUP

Besar harapan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi semua peserta yang ikut dalam seminar nasional ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 02 Agustus 2017

Ketua Panitia

Handrisal, S.Sos.,M.Si